

2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TABANAN



KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa serta mengingat sangat pentingnya laporan ini sehingga kami segenap Pimpinan dan staf Dinas Ketahanan Pangan akhirnya dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan ini memuat kegiatan yang telah dilakukan pada segenap jajaran SKPD Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2022, sehingga laporan ini sangatlah penting untuk mengetahui apa yang telah dilakukan dan apa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya sehingga dengan mengetahui hal tersebut dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 yang akan datang.

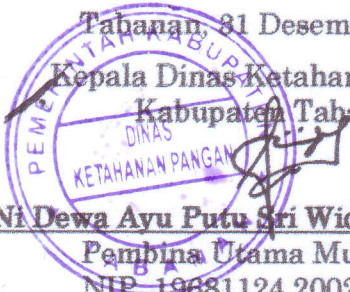
Kami sadar bahwa laporan ini sangatlah jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua instansi baik formal maupun informal dan masyarakat, demi sempurnanya laporan ini sangat diperlukan demi terciptanya laporan yang *acountable* dan *responsibility* sehingga dapat dijadikan pedoman untuk mewujudkan *Government dan Good Governance*.

Demikian dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga laporan ini dapat diselesaikan.

Om Santi Santi Santi Om

Tabanan, 31 Desember 2022

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Tabanan,

A
Ni Dewa Ayu Putu Sri Widyanti, SP, M.Si
Pembina Utama Muda/(IV/c)
NIP. 19681124 200212 2 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR TABEL	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.4 Struktur Organisasi	8
1.5 Sistematika LAKIP/LKJiP Dinas Ketahanan Pangan	9
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
2.1 Rencana Strategis	10
A. Visi dan Misi Kabupaten	10
B. Tujuan	11
C. Sasaran	11
D. Indikator Kinerja Utama	12
2.2 Rencana Kinerja	13
2.3 Perjanjian Kinerja	17
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja	22
3.2 Analisis Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun 2021	26
3.3 Realisasi Keuangan	44
BAB IV. PENUTUP	63
4.1 Kesimpulan	63
4.2 Saran-Saran	63
Lampiran	
1. Pengukuran Kinerja	
2. Rencana Strategis	
3. Rencana Kinerja Tahunan	
4. Perjanjian Kinerja	
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejak bergulirnya otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka keinginan Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik menuju *Good Governance* terus dimantapkan. Kehadiran UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih serta Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), telah mendorong perkembangan sistem pemerintahan yang bersih dengan tekad melakukan reformasi pengelolaan keuangan. Pemerintah Kabupaten Tabanan beserta seluruh jajarannya, termasuk Dinas Ketahanan Pangan bertekad mengemban amanat rakyat sesuai dengan arus reformasi dan paradigma baru yang berkembang di masyarakat. Perubahan ini mengharuskan pemerintah untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, sehingga dituntut terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Tata kelola pemerintahan yang baik menuju *good governance*, merupakan dambaan setiap warga negara. Gerakan tata kelola pemerintahan yang baik menuju *good governance* telah dirintis sejak lahirnya Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang – Undang No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Untuk mendukung gerakan tersebut, Presiden Republik Indonesia, menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999. Inpres Nomor 7 tahun 1999 mewajibkan setiap pejabat eselon 2 ke atas menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) dan melaporkan hasil pelaksanaannya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Setelah berjalan selama lima tahun, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dipandang belum optimal. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 baru mampu mengubah *mindset* birokrasi menuju *good governance* pada tatanan wacana, belum banyak menyentuh praktek. Memperhatikan kondisi tersebut, maka Presiden Republik Indonesia menerbitkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Implementasi dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999 maupun Inpres Nomor 5 Tahun 2004 diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**Sistem AKIP**).

Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (*Outcomes oriented*). Sistem AKIP diimplementasikan secara “*self assesment*” oleh masing-masing instansi pemerintah.

Self assesment maksudnya, instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

Sistem AKIP terus dimantapkan, seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut mengamanatkan kewajiban pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Renstra dijabarkan dalam rencana Kinerja Tahunan (RKT), RKT yang telah mendapatkan persetujuan alokasi dana dipakai sebagai dasar menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA yang telah mendapat persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis ditetapkan menjadi Penetapan Kinerja.

Penetapan kinerja memuat: Pernyataan Penetapan Kinerja Aparatur beserta Lampiran yang berisi : Program-program utama, Sub Program Kerja (Kegiatan), Sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome), Ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa Indikator kinerja output dan atau outcome, Rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator dan Anggaran untuk setiap program utama. Pelaksanaan Penetapan Kinerja ini dilaporkan dalam Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Evaluasi hasil kinerja tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis pengukuran yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan yaitu

- i. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PK) berdasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD didasarkan pada DPA Dinas Ketahanan Pangan, dengan pencapaian rata-rata adalah 88,96%.
- ii. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PS) Dinas Ketahanan Pangan didapat prosentase pencapaian sasaran adalah 97,22%. Hal ini menunjukkan Dinas Ketahanan Pangan selaku salah satu OPD telah mampu mencapai sasaran yang telah digariskan/ditetapkan. Dari analisis capaian kinerja dan aspek keuangan dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan dua (2) buah Program, 8 (delapan) buah kegiatan, 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan dengan satu (1) Sasaran. Hasil capaian kinerja sasaran kegiatan disajikan dalam bentuk tabel terlampir.

Untuk perbaikan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan diajukan dua saran adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan dan penajaman skala prioritas sasaran dan tujuan dari kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya,
2. Untuk mengatasi permasalahan yang sulit dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai *stakeholder*.

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Hal
1	Tujuan Daerah	11
2	Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan	12
3	Indikator Kinerja Utama	12
4	Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022	13
5	Program/Kegiatan Perubahan Tahun 2022	15
6	Program dan Anggaran Sesuai Sasaran Strategis	17
7	Perbandingan Rencana Kerja dengan Penetapan Kinerja Tahun 2022	18
8	Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022	24
9	Capaian Kinerja Meningkatkan Ketersediaan Komoditas Pangan Strategis Nasional	26
10	Data Harga Pangan di Kabupaten Tabanan Tahun 2022	28
11	Data Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) di Kabupaten Tabanan	31
12	Jumlah Persediaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2022	32
13	Rekapitulasi Hasil Uji Cepat Pangan Segar Asal Tumbuhan (Rapid Test Kit Pestisida Golongan Organophosphate dan Carbamate)	33
14	Daftar Kelompok Sertifikat Prima 3	34
15	Surat Keterangan Registrasi PSAT	35
16	Level Sanitasi Hygiene	37
17	Realisasi Kegiatan pada Sasaran Meningkatkan Ketersediaan Komoditas Pangan Strategis Nasional	38
18	Sasaran dan Indikator Kinerja Meningkatkan Distribusi Pangan	39
19	Data Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Tabanan	39
20	Sasaran dan Indikator Kinerja Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	40
21	Realisasi Anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42
22	Realisasi Serapan Anggaran Belanja Sumber Dana APBD Kabupaten Tabanan Tahun 2022	45
23	Realisasi Serapan Anggaran Belanja Sumber Dana APBN Kabupaten Tabanan Tahun 2022 (Dana Dekonsentrasi)	47
24	Serapan APBD dan APBN Tahun 2021 dan 2022	48
25	Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun-Tahun Sebelumnya	49
26	Capaian Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 sesuai dengan Rencana Jangka Menengah (Renstra) 2016-2021	57
27	Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022 sesuai dengan Rencana Jangka Menengah (Renstra) 2021-2026	58
28	Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Kabupaten Lain, Provinsi dan Tingkat Nasional	58
29	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pemerintah memprioritaskan agenda pembangunan yakni kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi melalui ketersediaan pangan, stabilitas harga pangan, perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan.

Upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan di dalam memenuhi kebutuhan pangan adalah melalui program Desa Mandiri Pangan, Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan, Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat dan Lumbung Pangan Masyarakat yang telah aktif diberdayakan sehingga keluar dari lingkaran kemiskinan.

Untuk memantapkan ketahanan pangan tersebut ditemukan beberapa kendala diantaranya yaitu 1) kepemilikan luas lahan yang terus berkurang, 2) perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu, 3) masyarakat masih terbiasa mengkonsumsi beras dan sulit berganti ke umbi-umbian. Berdasarkan tugas Dinas Ketahanan Pangan, permasalahan yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan ketahanan pangan adalah sebagai berikut :

- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi
 - 1) Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan untuk ditanami tanaman sayur
 - 2) Ketersediaan pangan tidak merata sepanjang tahun (sifat musiman) dan tidak semua wilayah adalah sentra pangan
 - 3) Perhitungan cadangan pangan hanya berdasarkan proyeksi tanam/panen (sulit menghitung cadangan pangan di masyarakat)
 - 4) Konsumsi beras relatif cukup tinggi dan ketergantungan pada beras
 - 5) Konsumsi pangan lokal terbatas karena semakin berkembangnya pangan olahan pabrikan
 - 6) Distribusi pangan tidak optimal karena belum adanya pasar-pasar khusus pangan (yang dikelola pemerintah maupun swasta)
 - 7) Belum intensifnya promosi dan fasilitasi pemasaran karena keterbatasan dana dan kemampuan
 - 8) Belum optimalnya pengawasan peredaran pangan segar asal tumbuhan.

Penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas melalui kontrol masyarakat diyakini mampu

mewujudkan tiga tujuan otonomi daerah yaitu : Layanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Tata kelola pemerintahan yang baik menuju *good governance*, merupakan dambaan setiap warga negara. Gerakan tata kelola pemerintahan yang baik menuju *good governance* telah dirintis sejak lahirnya Ketetapan MPR No.XI/MPR/1998 dan Undang – Undang No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Untuk mendukung gerakan tersebut, Presiden Republik Indonesia, menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999. Inpres Nomor 7 tahun 1999 mewajibkan setiap pejabat eselon 2 ke atas menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) dan melaporkan hasil pelaksanaannya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Setelah berjalan selama lima tahun, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dipandang belum optimal. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 baru mampu mengubah *main set* birokrasi menuju *good governance* pada tataran wacana, belum banyak menyentuh praktek. Memperhatikan kondisi tersebut, maka Presiden Republik Indonesia menerbitkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Implementasi dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999 maupun Inpres Nomor 5 Tahun 2004 diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (*Outcomes oriented*). Sistem AKIP diimplementasikan secara “*self assesment*” oleh masing-masing instansi pemerintah. *Self assesment* maksudnya, instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

Sistem AKIP terus dimantapkan, seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut mengamanatkan kewajiban pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Renstra dijabarkan dalam rencana Kinerja Tahunan (RKT), RKT yang telah mendapatkan persetujuan alokasi dana dipakai sebagai dasar menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA yang telah mendapat persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis ditetapkan menjadi Penetapan Kinerja.

Penetapan kinerja memuat: Pernyataan Penetapan Kinerja Aparatur beserta Lampiran yang berisi : Program-program utama, Sub Program Kerja (Kegiatan), Sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome), Ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa (Indikator kinerja output dan atau outcome, Rencana tingkat

capaian untuk masing-masing indikator dan Anggaran untuk setiap program utama). Pelaksanaan Penetapan Kinerja ini dilaporkan dalam Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2 Dasar Hukum

Pembangunan ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat serta memperkuat jati diri dan kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam perencanaan pembangunan, Dinas Ketahanan Pangan memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*good governance*).

Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita – cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka dalam konsep Sistem AKIP, penyusunan LAKIP tentu didasari oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun dasar hukum penyusunan LAKIP Dinas Ketahanan Pangan adalah :

- (1). Landasan Idiil yaitu Pancasila,
- (2). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,
- (3). Landasan Operasional :
 - a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4355);
 - c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- m. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- n. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- o. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);

- p. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 16);
- q. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 13);

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas diatur dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut adalah sebagai berikut :

A. Tugas Pokok

Membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan di bidang ketahanan pangan

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas :

- a. menyusun kebijakan urusan pemerintahan dalam bidang ketahanan pangan;
- b. merumuskan ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi serta kewaspadaan dan keamanan pangan;
- c. merencanakan pelaksanaan kegiatan bidang ketahanan pangan;
- d. mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan bidang ketahanan pangan;
- e. mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang ketahanan pangan;
- f. mengkoordinasikan program kegiatan bidang ketahanan pangan dengan bidang terkait;
- g. menginventarisasi permasalahan bidang ketahanan pangan dan mencari alternatif pemecahannya;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan; dan
- i. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2. Fungsi

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dalam arti luas
- b. menghimpun data keadaan pangan di Kabupaten Tabanan
- c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan

- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah

Adapun susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 seperti berikut ini :

- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris
 - 2.1. Kasubag Umum dan Keuangan
 - 2.2. Analis SDM Aparatur Ahli Muda
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 - 3.1. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
 - 4.1. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
- e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
 - 5.1. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda

Adapun Uraian Tugas dan Fungsi Pokoknya sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja dinas ketahanan pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
- c. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi peningkata diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
- d. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
- e. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengawasan keamanan pangan;
- f. monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja dinas ketahanan pangan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- h. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2. Sekretaris mempunyai tugas:

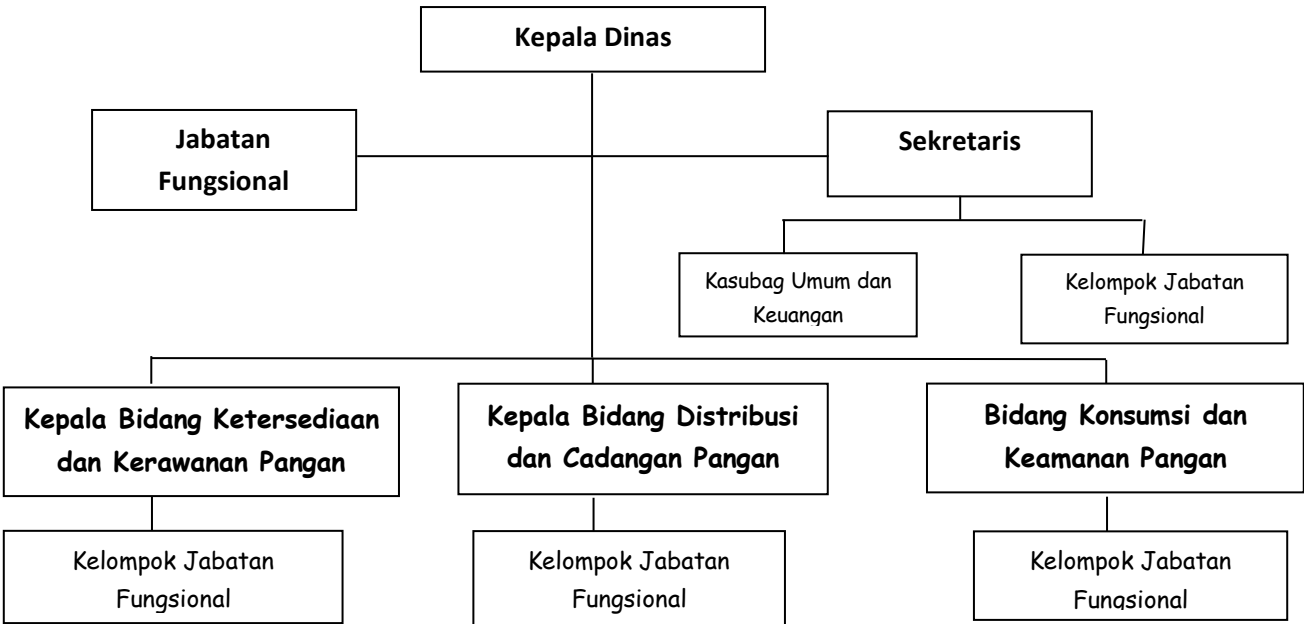
- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran dinas ketahanan pangan;
- b. koordinasi menyusun program kerja lingkup sekretariat;
- c. koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
- e. pembinaan aparatur dan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian;
- f. koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- g. koordinasi dan pengelolaan data dan informasi serta publikasi;
- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
- i. penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- j. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;

- k. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sekretaris dinas ketahanan pangan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja sub bagian umum dan keuangan;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha (persuratan, dokumentasi dan kearsipan);
 - c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/daerah, keamanan dan ketertiban kantor;
 - d. melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
 - e. menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - g. menyiapkan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - h. melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;
 - i. menyusun perencanaan, program dan anggaran dinas ketahanan pangan;
 - j. menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan;
 - k. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - l. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
 - m. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan;
 - n. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
 - o. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan keuangan; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas:
- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang penanganan kerawanan pangan;
 - b. penyusunan program kerja lingkup bidang penanganan kerawanan pangan;
 - c. pelaksanaan kegiatan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
 - d. pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten;
 - e. penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan;
 - f. koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten
 - g. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - h. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang penanganan kerawanan pangan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas:
- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
 - b. penyusunan program kerja lingkup bidang peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;

- c. pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten;
 - d. pelaksanaan kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - e. pelaksanaan kegiatan penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
 - f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidangpeningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
6. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas
- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang pengawasan keamanan pangan dan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
 - b. penyusunan program kerja lingkup bidang pengawasan keamanan pangan dan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten;
 - d. pelaksanaan kegiatan pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
 - e. pelaksanaan kegiatan pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
 - f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidangpengawasan keamanan pangan dan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4 Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan



Berdasarkan data pada bulan Desember 2022 kondisi Dinas Ketahanan Pangan dapat diuraikan sebagai berikut :

Dalam mendukung tugas pokok dan fungsi sebagai kewenangan Dinas Ketahanan Pangan memiliki Personalia sebanyak 31 orang terdiri atas PNS 23 orang dan Non PNS 8 orang. Berdasarkan golongannya, PNS di Dinas Ketahanan Pangan terdiri atas 3 orang Golongan IV, 13 orang golongan III, 7 orang golongan II. Berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai Dinas Ketahanan Pangan terdiri atas S-2 sebanyak 5 orang, S-1 sebanyak 14 orang, Sekolah Menengah sebanyak 16 orang.

1.5 Sistematika LAKIP/LKJiP Dinas Ketahanan Pangan

Dokumen LKJiP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.4. Struktur Organisasi
- 1.5. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
 - A. Visi dan Misi Kabupaten Tabanan
 - B. Tujuan
 - C. Sasaran
 - D. IKU (Indikator Kinerja Utama)
- 2.2. Rencana Kinerja
- 2.3. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja
- 3.2. Analisis Capaian Kinerja
- 3.3. Realisasi Keuangan

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Saran

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

A. Visi dan Misi Kabupaten

Setiap lembaga perlu memiliki visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang panjang. Dalam Modul Perencanaan Berbasis Kinerja & Perjanjian Kinerja disebutkan : “Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif, dan inovatif”. (Meneg PAN, 2008:18). Visi merupakan suatu gambaran yang menantang, keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah serta mampu sebagai perekat.

Kabupaten Tabanan sebagai salah satu Pemerintah Daerah wajib menetapkan visi dan misi. Perumusan Visi Kabupaten Tabanan menggambarkan : Apa yang ingin dicapai, berorientasi pada masa depan, mempunyai arah dan fokus strategis jelas sehingga dapat mempersatukan seluruh komponen stakeholder di Kabupaten Tabanan

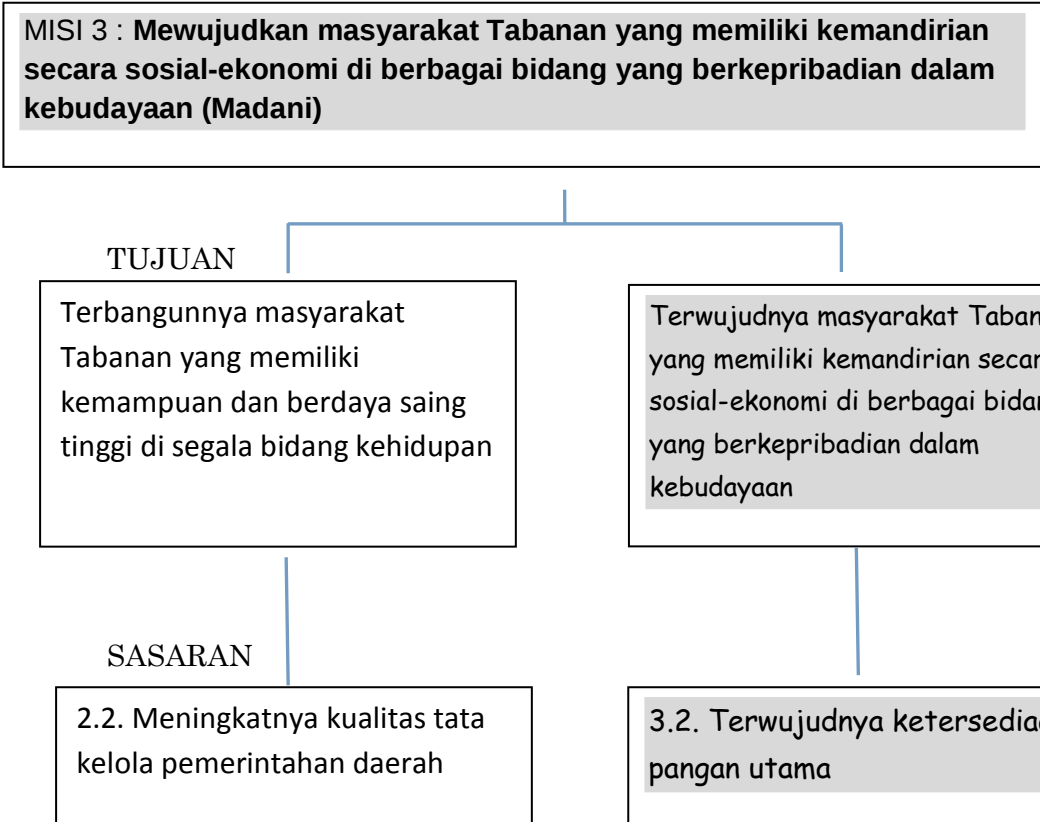
Visi Kabupaten Tabanan yaitu : **Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, dan Madani (AUM)**

Meneg PAN menyatakan: “Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya” (Meneg 2008:20)

Misi :

1. Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)
2. Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)
3. Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tabanan, Dinas Ketahanan Pangan terdapat pada **Misi 3 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)**



B.Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Meneg PAN menyatakan: “Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi (Meneg.PAN, 2008:20). Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan Dinas Ketahanan Pangan adalah seperti tabel dibawah ini:

Tabel 1. Tujuan Daerah

No	Misi 3	Tujuan
1	Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)	Terwujudnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan

C. Sasaran

Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan” (Meneg PAN, 2008:21-22). Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sasaran (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu

kegiatan. Dari dua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu bulanan, triwulanan paling lama satu tahun.

Sasaran Dinas Ketahanan Pangan merupakan bagian integrasi dari proses perencanaan strategis, dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka panjang yang sifatnya menyeluruh serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Sasaran Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan adalah seperti tabel dibawah ini;

Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan menuju kemandirian pangan	1. Meningkatkan ketersediaan komoditas pangan strategis nasional 2. Memperkuat distribusi pangan strategis nasional
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

D. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan serta RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2022 – 2026. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator – indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang fokusnya pada *internal bussines process* (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2022 – 2026 sesuai periode Renstra seperti tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 3. Indikator Kinerja Utama

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2022
Meningkatkan ketersediaan komoditas pangan strategis nasional	Rasio ketersediaan komoditas pangan strategis nasional terhadap kebutuhan masyarakat	80 %
Memperkuat distribusi pangan strategis nasional	Ketersediaan sarana prasarana pendukung kualitas pangan utama	1 gapoktan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai LKJiP	72 B

2.2 Rencana Kinerja

Rencana Kinerja ditetapkan dengan maksud untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2022 bagi seluruh aparatur lingkup Dinas Ketahanan Pangan guna mewujudkan tujuan yang diharapkan. Tujuannya adalah untuk mempertajam prioritas program dan kegiatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Tabel 4. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan	Output			Pagu Anggaran
		Indikator	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100	%	4.424.274.650
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	3	Dokumen	5.000.000
a	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	2	Dokumen	3.000.000
b	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen evaluasi PD	1	Dokumen	2.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan PD	100	%	4.072.216.000
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	100	%	4.069.716.000
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan asset yang tersedia	2	Dokumen	2.500.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum PD	100	%	59.467.100
a	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	100	%	1.250.000
b	Penyediaan peralatan rumah tangga	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyediaan peralatan rumah tangga	100	%	2.248.950
c	Penyediaan bahan logistik kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan logistic kantor	100	%	19.999.500
d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100	%	3.499.500
e	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	persentase terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	%	1.250.000
f	Penyediaan bahan/ material	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyediaan bahan/ material	100	%	11.499.150
g	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100	%	19.720.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang	100	%	255.695.900

	Pemerintahan Daerah	urusan pemerintahan daerah			
a	Penyediaan jasa surat-menyerat	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyediaan jasa surat-menyerat	100	%	5.700.000
b	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	%	50.000.000
c	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	100	%	199.995.900
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	31.895.650
a	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100	%	24.995.650
b	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100	%	6.900.000
B	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	10	%	589.999.800
1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase ketersediaan dan penyaluran pangan	90	%	69.999.900
a	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Data Neraca Bahan Makanan (NBM)	1	data	12.500.000
b	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah kelompok yang mengusahakan konsumsi B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman)	10	KWT	34.999.900
c	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	Data harga pangan dan pasokan pangan	10	Kec	10.000.000
d	Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah kelompok/ poktan/ gapoktan yang dibina	3	Klp	12.500.000
2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase lokasi rentan rawan pangan yang tertangani	39	%	0
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	3	data	0
3	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan per Kapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase capaian target konsumsi pangan	70	%	519.999.900

a	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya local	Jumlah kelompok/ PKK yang mengusahakan penganekaragaman	8	Klp	500.000.000
b	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi per kapita per tahun	Jumlah kelompok atau usaha pertanian dan pasar tradisional menerapkan konsumsi dan keamanan pangan	10	Klp	19.999.900
Jumlah					5.014.274.450

Tabel 5. Program/Kegiatan Perubahan Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan	Output			Pagu Anggaran
		Indikator	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100	%	4.424.270.250
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	3	Dokumen	5.000.000
a	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan daerah	2	Dokumen	3.000.000
b	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan evaluasi PD	1	Laporan	2.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan PD	100	%	4.072.216.000
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25	Orang/ bulan	4.069.716.000
B	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	2	Laporan	2.500.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum PD	100	%	63.874.600
A	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	2	paket	1.250.000
b	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2	paket	3.616.750
c	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	paket	21.582.600
d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	paket	3.786.900
e	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2	dokumen	1.250.000
f	Penyediaan bahan/	Jumlah paket bahan/	7	paket	12.668.350

	material	material yang disediakan			
g	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5	laporan	19.720.000
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	251.295.900
a	Penyediaan jasa surat-menyerurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyerurat yang disediakan	2	laporan	1.300.000
b	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	laporan	50.000.000
c	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	laporan	199.995.900
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	31.883.750
a	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	7	unit	24.983.750
b	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10	unit	6.900.000
B	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan	80	%	604.661.800
1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase ketersediaan dan penyaluran pangan	75	%	69.999.900
a	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM)	1	Laporan	12.500.000
b	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	1	Laporan	34.999.900
c	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	1	Dokumen	10.000.000
d	Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan	3	Unit	12.500.000
2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase lokasi rentan rawan pangan yang tertangani	39	%	14.662.000

a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten/kota	3	Laporan	14.662.000
3	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan per Kapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase capaian target konsumsi pangan	70	%	519.999.900
a	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya local	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	2	Laporan	500.000.000
b	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi per kapita per tahun	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	1	Laporan	19.999.900
					5.028.932.050

2.3 Perjanjian Kinerja

Dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2022, maka disusunlah Penetapan Kinerja tahun 2022 di Dinas Ketahanan Pangan. Dari 3 program dan 11 kegiatan yang diusulkan tersebut terdapat 2 program dan 8 kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Misi 3 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)

No	Sasaran	Indikator	Target 2022
1	Meningkatkan ketersediaan komoditas pangan strategis nasional	Rasio ketersediaan komoditas strategis nasional terhadap kebutuhan masyarakat	80%
2	Memperkuat distribusi pangan strategis nasional	Ketersediaan sarana prasarana pendukung kualitas pangan utama	1 gapoktan
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai LKJIP	72 B

Tabel 6. Program dan Anggaran Sesuai Sasaran Strategis

No	Sasaran	Program	Anggaran
1	Meningkatkan ketersediaan komoditas pangan strategis nasional	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	604.661.800
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	69.999.900
		Pengelolaan dan Keseimbangan	14.662.000

		Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan per Kapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	519.999.900
2	Memperkuat distribusi pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	0
		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	0
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.424.274.650
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.072.216.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	63.874.600
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.295.900
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.883.750
		Total	5.028.932.050

Untuk tahun 2022 Anggaran Belanja yang bersumber dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 5.014.274.450,- dan Anggaran Perubahan menjadi Rp. 5.028.932.050,-. Belanja Pegawai sebesar 4.069.716.000,- dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 959.216.050,-

dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Pegawai : Rp. 4.069.716.000,-
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 959.216.050,-

Tabel 7. Perbandingan Rencana Kerja dengan Penetapan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022

No	Indikator	Target 2022	Program	Kegiatan	Indikasi Pendanaan	DPA Perubahan	Jumlah	Ket
1	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	3 dokumen	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Tetap
	Jumlah dokumen perencanaan daerah	2 dokumen		Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Tetap
	Jumlah laporan evaluasi kinerja PD	1 laporan		Evaluasi Kinerja P	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Tetap
2	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan PD	100%		Administrasi Keuangan PD	4.072.216.000	4.072.216.000	4.072.216.000	Tetap
	Jumlah orang yang menerima	25 orang/		Penyediaan Gaji dan	4.069.716.000	4.069.716.000	4.069.716.000	Tetap

gaji dan tunjangan ASN	bulan
Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	2 laporan
Persentase terpenuhinya administrasi umum PD	100%
Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket
Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket
Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	12 paket
Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket
Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen
Jumlah paket bahan/material yang disediakan	7 paket
Jumlah laporan penyelenggara n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5 laporan
Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 laporan
Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,	12 laporan

Tunjangan ASN				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Tetap
Administrasi Umum PD	59.467.100	63.874.600	63.874.600	Ber-tambah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1.250.000	1.250.000	1.250.000	Tetap
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.248.950	3.616.750	3.616.750	Ber-tambah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.999.500	21.582.600	21.582.600	Ber-tambah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.499.500	3.786.900	3.786.900	Ber-tambah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.250.000	1.250.000	1.250.000	Tetap
Penyediaan Bahan/ Material	11.499.150	12.668.350	12.668.350	Ber-tambah
Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.720.000	19.720.000	19.720.000	Tetap
Penyediaan Jasa Umum Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255.695.900	251.295.900	251.295.900	Ber-tambah
Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	5.700.000	1.300.000	1.300.000	Ber-kurang
Penyediaan Jasa Komunikasi,	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Tetap

	sumbu rer daya air dan listrik yang disediakan			Sumber Daya Air dan Listrik					
	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 laporan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.995.900	199.995.900	199.995.900	Tetap	
	Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.895.800	31.883.750	31.883.750	Ber-kurang	
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	7 unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.995.650	24.983.750	24.983.750	Ber-kurang	
	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	6.900.000	6.900.000	6.900.000	Tetap	
3	Persentase ketersediaan dan penyaluran pangan	75%	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	589.999.800	604.661.800	604.661.800	Ber-tambah	
	Informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 laporan		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM)	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Tetap	
	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	1 laporan		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	34.999.900	34.999.900	34.999.900	Tetap	
	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	1 dokumen		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Tetap	
	Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan	3 unit		Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Tetap	

Persentase lokasi rentan pangan yang tertangani	39%	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	0	14.662.000	14.662.000	Ber-tambah
Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten/kota	3 laporan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	0	14.662.000	14.662.000	Ber-tambah
Persentase capaian target konsumsi pangan	70%	Pelaksanaan Pencapaian target Konsumsi Pangan per Kapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	519.999.900	519.999.900	519.999.900	Tetap
Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	2 laporan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	500.000.000	500.000.000	500.000.000	Tetap
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	1 laporan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	19.999.900	19.999.900	19.999.900	Tetap
			5.014.274.450	5.028.932.050	5.028.932.050	Ber-tambah

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ada perubahan anggaran pada sub kegiatan karena disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah.

- Kegiatan yang mendapat anggaran adalah Pengendalian dan keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Sistem Pengukuran Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja disebut Indikator Kinerja Utama.

Dalam SAKIP pengukuran kinerja dilakukan dengan tiga pola yaitu pengukuran mandiri, pengukuran oleh eksternal dan kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal. Pengukuran mandiri sering pula disebut evaluasi mandiri (*self assesment*) yaitu pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan dan pengukuran termasuk menentukan ukurannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Pengukuran eksternal adalah pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan dan pengukuran dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, tetapi pengukuran dan penentuan ukurannya ditentukan oleh pihak lain. Kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal merupakan gabungan dari pengukuran mandiri dengan pengukuran oleh eksternal, hal ini dilakukan dengan cara, organisasi yang diukur menyiapkan data kinerjanya, melakukan evaluasi awal, selanjutnya hasil evaluasi tersebut dievaluasi lanjutan oleh instansi eksternal.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator*. Indikator Kinerja Utama merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja sasaran yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi Pemerintah Pusat maupun daerah dan SKPD dilingkungannya.

Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam pengukuran kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan diupayakan menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcomes dan menggambarkan keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan secara keseluruhan. Dalam menganalisis keberhasilan tersebut dilakukan dengan dua cara. Bagi sasaran Dinas Ketahanan Pangan yang didukung oleh tiga sasaran kegiatan, maka hasil capaian kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan ditentukan oleh rata-rata hasil kegiatan itu sendiri.

No	Sasaran	Indikator	Formula
1	Meningkatkan ketersediaan komoditas pangan strategis nasional	Rasio ketersediaan komoditas pangan strategis nasional terhadap kebutuhan masyarakat	(Jumlah komoditas strategis /Jumlah komoditas pokok) x 100%
2	Memperkuat distribusi pangan strategis nasional	Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kualitas pangan utama	(Jumlah realisasi terbangun)/ (Jumlah target) x 100%
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai LKJIP	Penilaian Inspektorat Kabupaten Tabanan

No	Program / Kegiatan	Indikator	Formula
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan	(Jumlah konsumsi pangan/ Jumlah ketersediaan) x 100%
1.1.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase ketersediaan dan penyaluran pangan	(Jumlah pangan pokok yang disalurkan LUPM)/ (Jumlah ketersediaan pangan pokok) x 100%
1.2.	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Persentase lokasi rentan rawan pangan yang tertangani	(Jumlah desa yang tertangani)/ (Jumlah desa rentan rawan pangan) x 100%
1.3.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase capaian konsumsi pangan	(Jumlah KWT yang menerapkan PPH)/ (Jumlah desa) x 100%
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	Nilai LKJIP

Untuk pengukuran capaian kinerja pada sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan dilakukan dengan membandingkan target pencapaian indikator sasaran strategis dengan realisasinya. Adapun hasil pengukuran capaian kerjanya seperti tabel dibawah ini :

Tabel 8. Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatkan ketersediaan komoditas pangan strategis nasional	Rasio ketersediaan komoditas pangan strategis nasional terhadap kebutuhan masyarakat melalui : - Informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan - Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia - Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan - Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan - Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten/kota - Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal - Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	1 laporan 1 laporan 1 dokumen 3 unit 3 laporan 2 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan 1 dokumen 3 unit 3 laporan 2 laporan 1 laporan	100 100 100 100 100 100
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan					100%
2.	Memperkuat distribusi pangan strategis nasional	Ketersediaan sarana prasarana pendukung kualitas pangan utama melalui :	0	0	0
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Nilai LKJip melalui : - Jumlah dokumen perencanaan daerah - Jumlah laporan evaluasi kinerja yang tersedia - Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN - Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/	2 dokumen 1 laporan 25 orang/bulan 2 laporan	2 dokumen 1 laporan 25 orang/bulan 2 laporan	100 100 100 100

		semesteran dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD			
		- Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	1 paket	15
		- Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket	2 paket	100
		- Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	100
		- Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	3 paket	100
		- Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	-	0
		- Jumlah paket bahan/ material yang disediakan	7 paket	3 paket	100
		- Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5 laporan	3 laporan	60
		- Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 laporan	2 laporan	100
		- Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	100
		- Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	100
		- Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	7 unit	7 unit	100
		- Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	10 unit	100
Rata Rata Capaian kinerja sub kegiatan					93,57%
Rata-Rata keseluruhan Capaian Kinerja					88,96%

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa ada tiga (3) sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan yaitu : 1) Meningkatkan ketersediaan komoditas pangan strategis nasional, 2) Memperkuat distribusi pangan strategis nasional, dan 3) Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

3.2. Analisis Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun 2022

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan dalam pengambilan keputusan. Analisis tersebut meliputi perbandingan antara hasil tahun ini dengan hasil tahun sebelumnya. Masing-masing bidang di Dinas Ketahanan Pangan saling bekerjasama untuk mencapai sasaran strategis OPD yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022. Pencapaian Kinerja masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

3.2.1. MISI “Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)”

Perwujudan misi “Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)” memiliki 3 sasaran yaitu Meningkatkan ketersediaan komoditas pangan strategis nasional; Memperkuat distribusi pangan; dan Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

1. Sasaran Meningkatkan ketersediaan komoditas pangan strategis nasional

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketersediaan pangan yang cukup (tidak dalam kondisi rawan pangan) melalui kegiatan : a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; b. Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota; dan c. pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

Tabel 9. Capaian kinerja Meningkatkan ketersediaan komoditas pangan strategis nasional

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2022			Tahun 2021	Naik/ Turun	
		TARGET	REALISASI	%	Realisasi	Bil	%
Meningkatkan ketersediaan komoditas pangan strategis nasional	Rasio ketersediaan komoditas pangan strategis nasional terhadap kebutuhan masyarakat melalui :	80	77,78	97,23	77,78	-	-
	Informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 laporan	1 laporan	100	-	-	-

Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	1 laporan	1 laporan	100	3 kelompok	-	-
Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	1 dokumen	1 dokumen	100	1 data	-	-
Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan	3 unit	3 unit	100	3 kelompok	-	-
Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten/kota	3 laporan	3 laporan	100	-	-	-
Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	2 laporan	2 laporan	100	8 KWT	-	-
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi	1 laporan	1 laporan	100	15 unit	-	-

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diuraikan bahwa sasaran strategis Meningkatkan ketersediaan komoditas pangan strategis nasional terhadap kebutuhan masyarakat dengan rata-rata capaian kinerja 97,23% yang diukur dengan 8 (delapan) indikator kinerja yaitu :

a. Indikator 1, Informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM)

Fluktuasi harga pangan pokok sangat erat hubungannya dengan pasokan dan ketersediaan pangan pokok di masyarakat. Ketersediaan dimaksud adalah hasil produksi dan ketersediaan di pasar sebagai mata rantai pasokan yang bersentuhan langsung dengan konsumen atau masyarakat. Neraca Bahan Makanan adalah tabel yang menyajikan gambaran menyeluruh tentang penyediaan dan penggunaan pangan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dalam bentuk zat gizi tertentu yaitu kalori (kkal/hari), protein (gram/hari), dan lemak (gram/hari). Ada dua (2) komponen dalam Neraca Bahan Makanan yaitu penyediaan (*supply*) dan penggunaan (*utilization*). Total penyediaan pangan (*supply*) didapat dari penjumlahan total produksi daerah ditambah impor pangan dikurangi ekspor dan stok. Sedangkan total penggunaan (*utilization*) adalah

bahan makanan ditambah pakan, ditambah bibit, ditambah tercecce, dan ditambah untuk keperluan industri. Jenis bahan makanan adalah semua jenis bahan makanan yang dapat/lazim dimakan penduduk, baik diperdagangkan maupun tidak, baik nabati maupun hewani. Kemudian dikelompokkan menurut jenisnya dari proses produksi sampai dikonsumsi dalam bentuk belum berubah atau bentuk lain yang berbeda setelah melalui proses pengolahan. Secara umum jenis makanan ini dikelompokkan dalam sebelas (11) bahan makanan yaitu : padi-padian, makanan berpati, gula, buah/biji berminyak, buah-buahan, sayur-sayuran, daging, telur, susu, ikan serta kelompok minyak dan lemak.

b. Indikator 2, Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia

Kelompok Wanita Tani (KWT) yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pengolahan bahan pangan dalam rangka penganeekaragaman konsumsi pangan. Pada Tahun anggaran 2022 melalui kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan sub kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan target 1 laporan terealisasi 1 laporan (100%). Pada tahun 2022 kelompok yang mendapat bantuan berupa spinner/alat peniris minyak dan alat press plastik yaitu : 1) KWT Tunjung Mesari, Ds Timpag, Kec. Kerambitan; 2) KWT Banyu Segara, Ds Gadung Sari, Kec. Selemadeg Timur; 3) KWT Jatayu, Ds Bengkel, Kec. Kediri; 4) KWT Taru Sari Giri, Ds Wanagiri, Kec. Selemadeg; dan 5) KWT Sari Jadi, Ds Tegal Jadi, Kec. Marga

c. Indikator 3, Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan .

Data harga pangan yang dikumpulkan dalam Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan sub kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2022 adalah angka dan fakta tentang harga komoditas pertanian tertentu yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Lokasi sasaran adalah di sepuluh (10) pasar tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Tabanan. Data harga pangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 10. Data Harga Pangan di Kabupaten Tabanan Tahun 2022

No	Komoditas	Rata-rata (Rp)	Satuan
1	Beras		
a	Premium	10.537,00	Kg
b	Medium	9.615,00	Kg
c	Beras merah	22.166,67	Kg
d	Injin	20.066,66	Kg
e	Ketan	21.250,00	Kg
2	Palawija		
a	Kedelai	11.864,83	Kg

b	Kacang tanah kupas 7 mm	23.941,67	Kg
c	Kacang hijau	20.900,12	Kg
d	Ubi kayu	4.166,67	Kg
e	Ubi jalar	4.866,67	Kg
f	Jagung pipilan	7.877,50	Kg
3	Sayur-sayuran		
a	Kol/kubis	7.616,67	Kg
b	Kacang panjang	7.091,66	Kg
c	Buncis	8.950,00	Kg
d	Wortel	16.858,33	Kg
e	Bawang daun	18.691,67	Kg
f	Bawang merah	28.151,67	Kg
g	Bawang putih	19.969,33	Kg
h	Cabai merah besar	37.559,00	Kg
i	Cabai rawit	45.469,00	Kg
j	Mentimun	6.533,33	Kg
k	Tomat	8.366,67	Kg
l	Kentang	15.441,67	Kg
4	Buah-buahan		
a	Manggis	16.392,67	Kg
b	Mangga	17.065,50	Kg
c	Pepaya	9.333,33	Kg
d	Jeruk	11.060,17	Kg
e	Salak local	7.075,00	Kg
f	Salak gula pasir	15.403,00	Kg
g	Nenas	4.333,34	Kg
h	Rambutan	7.625,57	Kg
i	Sawo	14.633,33	Kg
j	Adpokat	16.442,36	Kg
k	Anggur	14.891,67	Kg
l	Semangka	8.941,67	Kg
m	Melon	10.791,68	Kg
n	Apel	24.700,00	Kg
o	Jambu biji	13.275,23	Kg
5	Daging		
a	Sapi	100.870,33	Kg
b	Kambing	0	Kg
c	Babi	77.925,00	Kg
d	Ayam	35.499,34	Kg
e	Telur ayam kampung	1.913,33	Butir
f	Telur ayam ras	1.763,76	Butir
g	Telur itik	2.357,50	Butir
h	Telur asin	2.954,17	Butir
6	Ikan air tawar		
a	Gurami	39.677,08	Kg
b	Karper	32.650,00	Kg
c	Lele	24.540,25	Kg
d	Belut	58.633,33	Kg
e	Nila	40.189,58	Kg
7	Ikan air laut		
a	Kocing	23.816,67	Kg
b	Udang manis	64.287,33	Kg
c	Tongkol	23.033,54	Kg
d	Kepiting	45.000,00	Kg
e	Cumi	58.435,26	Kg
f	Teri	26.810,42	Kg
8	Gula		
a	Gula pasir DN	12.649,33	Kg
b	Gula pasir LN	0	Kg

c	Gula merah	24.650,00	Kg
9	Minyak goreng		
a	Pabrik	14.141,67	Kg
b	Super	19.046,26	Kg
c	Minyak kelentik	24.166,67	Botol
10	Lain-lain		
a	Tahu	5.083,33	Bungkus
b	Tempe	6.675,00	Bungkus
c	Garam	9.558,33	Kg
11	Rempah-rempah		
a	Kunir	9.000,25	Kg
b	Jahe	16.208,34	Kg
c	Lada	99.325,00	Kg
d	Ketumbar	29.308,34	Kg
e	Kencur	27.240,35	Kg
f	Kemiri	39.383,33	Kg
g	Asem	28.050,00	Kg
h	Lengkuas	8.050,00	Kg
12	Bahan Makanan dan Minuman		
a	Susu Indomilk coklat	10.666,67	Kotak
b	Susu Indomilk Putih	11.200,00	Kotak
13	Perkebunan		
a	Kelapa Butiran	6.170,83	Butir
b	Cengkeh	0	-
c	Kopi Ose	25.333,33	Kg
d	Kopi Bubuk	48.645,17	Kg
e	Kakao	25.125,00	Kg

- d. Indikator 4, Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan

Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan sub kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia pangan merupakan suatu upaya strategis untuk menjaga kestabilan distribusi pasokan pangan khususnya beras di tingkat wilayah Gapoktan maupun masyarakat sekitarnya. Tahun 2022 Lembaga Usaha Pangan Masyarakat yang mendapat pembinaan adalah : 1) Poktan Dwi Darma, Ds. Tunjuk, Kec. Tabanan; 2) Poktan Wana Merta, Ds Mambang, Kec. Selemadeg Timur; dan 3) Subak Bengkel, Ds. Bengkel, Kec. Kediri. Pentingnya pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

- ✓ Masih belum optimalnya distribusi pangan khususnya beras
- ✓ Situasi iklim yang tidak menentu yang menyebabkan stok maupun pasokan pangan berupa beras tidak merata di wilayah Kabupaten Tabanan
- ✓ Fluktuasi atau goncangan harga pasar

Karena pentingnya optimalisasi distribusi, stok maupun pasokan pangan berupa beras maka tahun 2022 ini Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas

Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan tersebut dengan tujuan : 1) mengawal lembaga distribusi pangan yang difasilitasi dana dari pemerintah dalam penyerapan gabah petani maupun distribusi beras, baik yang fase penumbuhan, pengembangan maupun yang sudah mandiri, 2) mengantisipasi apabila terjadi gagal panen di wilayah gapoktan maupun fluktuasi harga pangan (beras).

Tabel 11. Data Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) di Kabupaten Tabanan

No	Kecamatan/Desa	Gapoktan	Pendamping	Keterangan
1	Tabanan 1) Bongan 2) Sudimara	Sinar Abadi Subak Sakeh	Ir. I Md Suardana I G A Esti Handayani, SP	
2	Kediri 1) Bengkel	Subak Bengkel	I Wayan Suladera, SP	
3	Kerambitan 1) Belumbang 2) Penarukan	Subak Belumbang Subak Enggung	I Gst Wy Sumerta, S.PKP I Dw Kt Putra Winaya	
4	Penebel 1) Penebel 2) Penatahan 3) Tajen 4) Mengesta	Batur Sari Subak Penatahan Subak Tajen Subak Wongaya Betan	I Made Adiputra, S.SP I Nengah Sukarda Baiq Winarni I Nyoman Adiana	
5	Marga 1) Tua 2) Geluntung	Subak Pama Subak Uma Bali	I Made Suarkadana, SP I Ketut Kartika	
6	Baturiti 1) Perean 2) Angseri	Subak Palean Subak Tegeh	I Nengah Jirna, SP Ngakan Nym Patra, SP	
7	Selemadeg Timur 1) Tanggun Titi 2) Megati	Subak Aseman IV Subak Aseman III	Ni Md Nanik Suciati, SP I Made Wardana, SP	
8	Selemadeg 1) Brembeng	Subak Lanyah Bajera III	I Made Winasa, SP	

- e. Indikator 5, Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten/kota

Pengembangan cadangan pangan merupakan suatu upaya strategis untuk mendukung penyediaan cadangan pangan dalam menghadapi kekurangan ketersediaan pangan dan atau keadaan darurat. Hal ini sejalan dengan salah satu implementasi program pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan yaitu melalui upaya peningkatan pemantapan ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Pentingnya cadangan pangan disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

- ✓ Masih adanya penduduk miskin dan rentan rawan pangan
- ✓ Situasi iklim yang tidak menentu yang menyebabkan bencana (longsor, banjir, kekeringan, gagal panen)

- ✓ Fluktuasi harga pasar
- ✓ Pandemi covid19 yang terjadi pada awal tahun 2021

Tahun 2022 tidak ada pengadaan beras untuk pengisian gudang cadangan pangan. Sampai dengan tahun 2022 cadangan pangan belum tersalurkan kepada masyarakat sehingga stok beras di gudang CPP sebanyak 28.057,615 kg.

Tabel 12. Jumlah Persediaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2022

No	Uraian	2020	2021	2022
1	Persediaan beras (kg)	25.927,615	2.130	0
	JUMLAH			28.057,615

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa untuk Tahun 2022 ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah dikategorikan cukup tersedia.

- f. Indikator 6, Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal
- Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan menyasar Kelompok Wanita Tani (KWT) sebanyak 12 kelompok melalui kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan atau lahan kosong yang tidak produktif untuk dimanfaatkan sebagai tempat bertanam sehingga dapat secara berkelanjutan menyediakan sumber pangan bagi masyarakat sekaligus menjadikan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan, serta pendapatan anggota kelompok masyarakat. Tahun 2022 realisasasi sebanyak 12 KWT yaitu :
- 1) KWT Mekar Sari, Ds Banjar Anyar, Kec. Kediri
 - 2) KWT Mekar Sari, Ds Biaung, Kec. Penebel
 - 3) KWT Mekar Sari, Ds Berembeng, Kec. Selemadeg
 - 4) KWT Abian Sari, Ds Baturiti, Kec. Baturiti
 - 5) KWT Mekar Sari, Ds Petiga, Kec. Marga
 - 6) KWT Kusuma Sari, Ds Sembung Gede, Kec. Kerambitan
 - 7) KWT Inti Sari, Ds Mundeh Kauh, Kec. Selemadeg Barat
 - 8) KWT Sekar Sari, Ds Bantiran, Kec. Pupuan
 - 9) KWT Kuwat, Ds Abian Tuwung, Kec. Kediri
 - 10) KWT Sari Sedana, Ds Senganan, Kec. Penebel
 - 11) KWT Merta Sari Werdhi II, Ds Kesiut, Kec. Kerambitan
 - 12) KWT Bhineka Tani Piling, Ds Mengesta, Kec. Penebel

- g. Indikator 7, Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun

Dalam rangka keamanan pangan yaitu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia diperlukan upaya berupa kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan pangan segar yang aman dan sehat untuk dikonsumsi. Kegiatan yang dimaksud adalah dengan melakukan uji sampel terhadap bahan makanan segar dengan alat rapid test kit uji pangan segar asal tumbuhan di 10 pasar tradisional di 10 kecamatan di Kabupaten Tabanan.

Tabel 13. Rekapitulasi Hasil Uji Cepat Pangan Segar Asal Tumbuhan (Rapid Test Kit Pestisida dari Golongan Organophosphate dan Carbamate)

No	Hari/ Tanggal	Nama Pedagang	Lokasi Pasar	Jenis	Hasil
1	Senin/ 25-07-2022	Ni Wayan Winarsih	Baturiti	Brokoli	Aman
2	Selasa/ 26-07-2022	Rembo	Suraberata	Bayam	Aman
3	Rabu/ 27-07-2022	Ni Nengah Sitiari	Penebel	Sawi Putih	Aman
4	Kamis/ 28-07-2022	Nurlela	Pupuan	Kubis	Aman
5	Jumat/ 29-07-2022	Ni Made Murdini	Tabanan	Kacang Panjang	Aman
6	Senin/ 01-08-2022	Ni Made Mulini	Marga	Cabe Kecil	Aman
7	Selasa/ 02-08-2022	Ni Wayan Suci	Bajera	Buncis	Aman
8	Rabu/ 03-08-2022	Ni Putu Sehati	Senganan	Tomat	Aman
9	Kamis/ 04-08-2022	Ni Wayan Siki	Kerambitan	Sawi Hijau	Aman
10	Jumat/ 05-08-2022	Sagung Putu Surati	Kediri	Kangkung	Aman

Untuk produk beras, pendaftaran kualitas beras atau sertifikasi dan registrasi beras agar bersertifikat dapat didaftarkan pada Rice Milling Unit (RMU) UD Merta Asih Desa Beraban Kecamatan Kediri dengan sasaran pelaku usaha beras untuk uji mutu beras (beras bersertifikat). Berikut daftar kelompok organik dan Prima 3 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 14. Daftar Kelompok Sertifikasi Prima 3

No	Komoditas	Nama Subak/Gapoktan/ Klp/ UD	No. Sertifikat	Status
1	2	3	4	5
1	Cabe kecil/rawit Selada	Klp Tani Setia Makmur Ds Antapan Kec Baturiti	51.02-3-II.17-10-09/2017 51.02-3-II.65-11-09/2017	Sertifikat Prima 3 Tidak Berlaku
2	Salak Gula Pasir	Klp Tani Kerta Sari Br Anggarsari Kaja Ds Munduk Temu Kec. Pupuan	51.02-3-I-50-46-09/20	Sertifikat Prima 3 Aktif
3	Nanas	Klp Tani Sarwa Nadi Br Mayungan Let Ds Antapan Kec. Baturiti	51.02-3-I-44-22-10/2018	Sertifikat Prima 3 Tidak Berlaku
4	Bit	Klp Tani Nangun Tani Ds Candi Kuning, Kec. Baturiti	51.02-3-II-135-24-11/2018	Sertifikat Prima 3 Tidak Berlaku
5	Kentang	Klp Tani Mega Farm Ds Candi Kuning, Kec. Baturiti	51.02-3-II-135-25-11/2018	Sertifikat Prima 3 Tidak Berlaku
6	Selada Tomat Mentimun Seledri	UD Wiguna Makmur Br Pemuteran, Ds Candi Kuning, Kec. Baturiti	51.02-3-II-65-28-09/2019 51.02-3-II-62-29-09/2019 51.02-3-II-71-30-09/2019 51.02-3-II-48-31-09/2019	Sertifikat Prima 3 Aktif
7	Aneka selada (selada Loro Roso, selada keriting, selada bulat, Baby Romana, Misuna, selada merah)	Klp Tani Nangun Tani Br Kembang Merta Ds Candi Kuning, Kec. Baturiti	51.02-3-II-67-37-11/2019	Sertifikat Prima 3 Aktif
8	Spinach Zucchini	Klp Tani Nangun Tani Br Kembang Merta Ds Candi Kuning, Kec. Baturiti	51.02-3-II-65-34-12/2019 51.02-3-II-74-38-12/2019	Sertifikat Prima 3 Aktif
9	Salak	Klp Tani Guna Karya Br Munduk Temu Kelod Ds Munduk Temu Kec. Pupuan	51.02-3-II-50-45-09/2021	Sertifikat Prima 3 Aktif
10	Salak	Klp Tani Astu Bumi Sedana Br Anggasari Kaja Ds Munduk Temu Kec. Pupuan	51.02-3-II-50-46-09/2021	Sertifikat Prima 3 Aktif
11	Pepaya	Klp Tani Calina Agro Sari Ds Riang Gede Kec. Penebel	51.02-3-I-45-48-11/2021	Sertifikat Prima 3 Aktif
12	Manggis	SA. Pemaksan Kaja Br. Pengreregan Kaja Ds. Lumbung Kec. Selemadeg Barat	51.02-3-I-37-58-11/2021	Sertifikat Prima 3 Aktif
13	Salak	Klp Tani Vanily Biofob Br. Kebon Jero Ds. Munduk Temu Kec. Pupuan	51.02-3-I-50-53-05/2021	Sertifikat Prima 3 Aktif
14	Salak	Klp Tani Karya Tani Br. Kebon Jero Ds. Munduk Temu Kec. Pupuan	51.02-3-I-50-52-05/2021	Sertifikat Prima 3 Aktif
15	Tomat	CV. Puri Cheery	51.02-3-II-71-50-05/2021	Sertifikat Prima 3

		Tomato Jl. Munduk Andong No. 86 Ds Bangli Kec. Baturiti		Aktif
--	--	--	--	-------

Tabel 15. Surat Keterangan Registrasi PSAT

No	Registrasi PSAT	Lokasi	Keterangan	Status
1	UD. Merta Asih	Desa Beraban, Kec. Kediri	Beras Poles Super "Srikaya Bali" Kemasan Kantong plastic 5 kg, 10 kg dan 25 kg Kementan RI PD 51.02.II.1.00-03-00007-11/17	Aktif
2	UD. Abdi Mertha	Ds Bantas, Kec Selemadeg Timur	Beras Poles Merk "Amertha" kemasan kantong plastic 5 kg dan karung plastic 10 kg dan 25 kg Kementan RI PD 51.02.II.1.00-03-00016-11/18	Aktif
3	PD Dharma Shantika	Jl. Pahlawan No. 17 Tabanan	Beras Putih Merk "Pertiwi Bali" kemasan 3 kg, 5 kg, 10 kg dan 25 kg Kementan RI PD 51.02.II.1.00-03-00020-01/19	Aktif
			Beras Mentik Susu "Pertiwi Bali" kemasan plastic vakum 1 kg Kementan RI PD 51.02.II.1.00-03-00021-01/19	Aktif
			Beras Merah Merk "Pertiwi Bali" kemasan plastic vakum 1 kg Kementan RI PD 51.02.II.1.00-03-00022-01/19	Aktif
			Beras Hitam Merk "Pertiwi Bali" kemasan plastic vakum 1 kg Kementan RI PD 51.02.II.1.00-03-00023-01/19	Aktif
4	UD. Boki Murni	Br. Bengkel Buduk Ds Bengkel Kec. Kediri	Beras Putih Merk "Boki" kemasan plastik 5 kg, karung plastik 10 kg dan 25 kg Kementan RI PD 51.02.II.1.00-03-00026-12/19	Aktif
5	UD. Sari Kuning	Br. Delod Puri Ds Kediri Kec. Kediri	Beras Putih Merk "Kendi Bali" kemasan plastik 5 kg, karung plastik 10 kg, 15 kg dan 25 kg Kementan RI PD 51.02.I.1.00-03-00031-06/20	Aktif
6	Subak Riang/UD. Merta Jaya	DS Riang Gede Kec. Penebel	Beras Putih Merk "Manik Sri" kemasan plastik 5 kg, karung plastik 10 kg dan 25 kg Kementan RI PD 51.02.I.1.00-03-00032-07/20	Aktif
7	UD. Kartika Putra	Br. Bongan Jawa Kangin Ds Bongan Kec. Tabanan	Beras Putih Merk "Lumbung Padi" kemasan plastik 5 kg, karung plastik 10 kg, 15 kg dan 25 kg Kementan RI PD 51.02.I.1.00-03-00038-09/20	Aktif
8	UD. Shanti Amertha	Br. Belumbang Kelod Ds Belumbang Kec. Kerambitan	Beras Putih Merk "Tunjung Biru" kemasan plastik 5 kg, karung plastik 10 kg dan 25 kg Kementan RI PD 51.02.I.1.00-03-00039-09/20	Aktif
9	UD Boki Murni	Br. Bengkel Buduk Ds Bengkel Kec. Kediri	Beras Hitam Merk "Raja" kemasan plastik 100 gr, 250 gr dan 2, 500 gr dan 1 kg	Aktif

			Kementan RI PD 51.02.I.1.00-03-00052-11/20	
10	Kop Pemasaran Mulia Sejahtera Jaya	Br. Dinas Piling Tengah, Ds. Mengesta, Kec. Penebel	Beras Putih Merk "Mulia" kemasan plastik 1 kg, 2 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 22 kg, 23 kg, 24 kg dan 25 kg Kementan RI PD 51.02.I.1.00097-11/21	Aktif
11	UD. Janten Arsa	Br. Batan Buah No. 11 Ds. Tangguntiti, Kec. Selemadeg Timur	Beras Putih Merk "Putu The I Ayu" kemasan plastik dan karung plastik : 5 kg, 10 kg, 22 kg, 23 kg, 24 kg dan 25 kg Kementan RI PD 51.02.I.1.00096-11/21	Aktif
12	UD. Janten Arsa	Br. Batan Buah No. 11 Ds. Tangguntiti, Kec. Selemadeg Timur	Beras Putih Merk "Putu" kemasan plastik dan karung plastik : 5 kg, 10 kg, 22 kg, 23 kg, 24 kg dan 25 kg Kementan RI PD 51.02.I.1.00095-11/21	Aktif
13	UD. Juli	Br. Dinas Piling Kanginan, Ds. Mengesta, Kec. Penebel	Beras Putih Merk "Bali Jelih" kemasan plastik dan karung plastik : 5 kg, 10 kg, 15 kg, 22 kg, 23 kg, 24 kg dan 25 kg Kementan RI PD 51.02.II.1.00.03-00092-10/21	Aktif
14	UD. Juli	Br. Dinas Piling Kanginan, Ds. Mengesta, Kec. Penebel	Beras Putih Merk "Cinta Damai" kemasan plastik dan karung plastik : 5 kg, 10 kg, 15 kg, 22 kg, 23 kg, 24 kg dan 25 kg Kementan RI PD 51.02.II.1.00.03-00091-10/21	Aktif
15	UD. Tulus Sari Amerta	Br. Palian, Ds. Luwus, Kec. Baturiti	Beras Putih Merk "Tunjung" kemasan plastik dan karung plastik : 5 kg, 10 kg, dan 25 kg Kementan RI PD 51.02.II.1.00.03-00090-10/21	Aktif
16	Perum Bulog Bali	GBB (Gudang Bulog Baru) Kediri II, Jl. Trisula No. 1 Kediri	Beras Fortifikasi Merk "Fortivit" kemasan 1 kg dan 5 kg (vakum plastic) Kementan RI PD 51.02.II.1.00.03-00089-09/21	Aktif
17	UD Dharma Karya	Br. Dinas Darma Kaja, Ds. Riang Gede, Kec. Penebel	Beras Putih Merk "Rajawali" kemasan plastik dan karung plastik : 5 kg, 10 kg, dan 25 kg Kementan RI PD 51.02.I.1.01. 00086-08/21	Aktif
18	UD. Widya Sari	Br. Batan Buah, Ds Tangguntiti, Kec. Selemadeg Timur	Beras Putih Merk "Putri Bali" kemasan plastik dan karung plastik : 2 kg, 5 kg, 10 kg, 23 kg, 24 kg, dan 25 kg Kementan RI PD 51.02.I.1.01-00084-08/21	Aktif
19	UD. Widya Sari	Br. Batan Buah, Ds Tangguntiti, Kec. Selemadeg Timur	Beras Putih Merk "Teratai Putih" kemasan plastik dan karung plastik : 2 kg, 5 kg, 10 kg, 23 kg, 24 kg, dan 25 kg Kementan RI PD 51.02.I.1.01-00085-08/21	Aktif
20	UD. Arisa Jaya	Br. Dinas Wongaya Betan, Ds Mengesta, Kec. Penebel	Beras Putih Non Organik Merk "Somya Pertiwi" kemasan plastik dan karung plastik : 1 kg, 5 kg, 10 kg, dan 25 kg Kementan RI PD 51.02.I.1.01-00083-07/21	Aktif

21	UD. Arisa Jaya	Br. Dinas Wongaya Betan, Ds Mengesta, Kec. Penebel	Beras Coklat Organik Merk "Somya Pertiwi" kemasan plastik dan karung plastik : 1 kg, 5 kg, 10 kg, dan 25 kg Kementan RI PD 51.02.I.1.01-00082-07/21	Aktif
22	UD. Arisa Jaya	Br. Dinas Wongaya Betan, Ds Mengesta, Kec. Penebel	Beras Hitam Organik Merk "Somya Pertiwi" kemasan plastik dan karung plastik : 1 kg, 5 kg, 10 kg, dan 25 kg Kementan RI PD 51.02.I.1.01-00081-07/21	Aktif
23	UD. Arisa Jaya	Br. Dinas Wongaya Betan, Ds Mengesta, Kec. Penebel	Beras Merah Organik Merk "Somya Pertiwi" kemasan plastik dan karung plastik : 1 kg, 5 kg, 10 kg, dan 25 kg Kementan RI PD 51.02.I.1.01.03-00080-07/21	Aktif
24	UD. Arisa Jaya	Br. Dinas Wongaya Betan, Ds Mengesta, Kec. Penebel	Beras Putih Organik Merk "Somya Pertiwi" kemasan 1 kg, 5 kg, 10 kg, dan 25 kg Kementan RI PD 51.02.I.1.01.03-00079-07/21	Aktif
25	UD. Sari Murni Utama	Br. Bengkel Gede, Ds Bengkel, Kec. Kediri	Beras Putih Merk "Jati Luwih" kemasan 5 kg, 10 kg, dan 25 kg Kementan RI PD 51.02.I.1.01-00062-03/21	Aktif
26	UD. Sari Murni Utama	Br. Bengkel Gede, Ds Bengkel, Kec. Kediri	Beras Putih Merk "Sari Lumbung" kemasan 5 kg, 10 kg, dan 25 kg Kementan RI PD 51.02.I.1.01-00061-03/21	Aktif
27	UD. Karya Sejahtera	Br. Piling Kawan, Ds Mengesta, Kec. Penebel	Beras Merah Merk "Cendana" kemasan 1 kg, 2 kg, dan 3 kg Kementan RI PD 51.02.I.1.01-00060-03/21	Aktif
28	UD. Karya Sejahtera	Br. Piling Kawan, Ds Mengesta, Kec. Penebel	Beras Putih Merk "Bintang Timur" kemasan 5 kg, 10 kg, 15 kg, dan 25 kg Kementan RI PD 51.02.I.1.01-00059-03/21	Aktif

Tabel 16. Level Sanitasi Hygiene

1	UD. Sari Kuning	Br. Delod Puri Ds Kediri, Kec. Kediri	04/SKLPSH/OKKPD-51/06/2021	
	Subak Riang/UD. Merta Jaya	DS Riang Gede Kec. Penebel	06/SKLPSH/OKKPD-51/07/2021	
	UD. Kartika Putra	Br. Bongon Jawa Kangin Ds Bongon Kec. Tabanan	09/SKLPSH/OKKPD-51/09/2021	
	UD. Shanti Amertha	Br. Belumbang Kelod Ds Belumbang Kec. Kerambitan	10/SKLPSH/OKKPD-51/09/2021	
	UD Boki Murni	Br. Bengkel Buduk Ds Bengkel Kec. Kediri	14/SKLPSH/OKKPD-51/11/2021	

Untuk lebih jelasnya capaian realisasi fisik dan keuangan masing-masing kegiatan tersebut disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 17. Realisasi kegiatan pada sasaran Meningkatkan ketersediaan komoditas pangan strategis nasional

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi (%)	
				Fisik	Keuangan
I	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	604.661.800	579.348.996	84,35	95,81
1	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	69.999.900	65.372.723	110,21	93,39
	- Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM)	12.500.000	11.418.941	100	91,35
	- Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	34.999.900	33.156.257	100	94,73
	- Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	10.000.000	9.512.657	100	95,13
	- Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	12.500.000	11.284.868	100	90,28
2	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	519.999.900	501.937.788	80,45	96,53
	- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	500.000.000	484.760.194	100	96,95
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	19.999.900	17.177.594	100	85,89
		604.661.800	579.348.996	84,35	95,81

2. Sasaran Memperkuat distribusi pangan strategis nasional

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan distribusi dan akses pangan melalui Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan seperti tabel dibawah ini.

Tabel 18. Sasaran dan Indikator Kinerja Meningkatkan Distribusi Pangan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2022			Tahun 2021	Naik/ Turun	
		TARGET	REALISASI	%	Realisasi	Bil	%
Memperkuat distribusi pangan strategis nasional	Ketersediaan sarana prasarana pendukung kualitas pangan utama :	-	-	-	1	1	-

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diuraikan bahwa sasaran strategis Memperkuat distribusi pangan strategis nasional pada tahun 2022 tidak mendapat pendanaan APBD yang bersumber dari dana DAK fisik karena terdapat persyaratan yang tidak bisa terpenuhi berupa kepemilikan lahan oleh gapoktan minimal 10 are (SHM).

Tabel 19. Data Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Tabanan

No	Nama	Lokasi		Ket
		Kecamatan	Desa	
1	Dwi Darma I Nym Sumadana	Tabanan	Tunjuk	
2	Wana Merta I Made Turka Suta	Selemadeg Timur	Mambang	
3	Subak Teben Telabah I Nyoman Suarnata	Pupuan	Belimbing	
4	Candra Nadi A.A Gede Santika	Pupuan	Pajahan	
5	Merta Asih I Made Sumaryono	Selemadeg Barat	Angkah	
6	Subak Anyar I Made Sudiarawan	Selemadeg Barat	Suraberata	
7	Pangan Lestari I Made Wiana	Selemadeg	Brembeng	
8	Sri Sedana Kerti I Ketut Suweden	Selemadeg Timur	Megati	
9	Dewi Sri I Made Pedra	Kediri	Nyitdah	
10	Subak Basang Be I Nyoman Rajin	Baturiti	Perean Kangin	
11	Dusun Gelagah I Wayan Suka	Marga	Payangan	
12	Subak Lanyah Wanasara A.A Putu Sugana	Tabanan	Bongan	

13	Subak Seronggo I Wayan Sumada	Kerambitan	Pangkung Karung	
14	Subak Tingkih Kerep I Wayan Sadri	Penebel	Tengkudak	

3. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Sasaran ini dimaksudkan agar serapan anggaran sesuai dengan target sehingga Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP/LAKIP) kategori “B” melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Dari sasaran tersebut ditetapkan indikator kinerja seperti digambarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 20. Sasaran dan Indikator Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2022			Tahun 2021	Naik/ Turun	
		TARGET	REALISASI	%	Realisasi	Bil	%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	-	-
	- Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	-	-
	- Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	-	-
	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100	100%	-	-
	- Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 orang/bulan	25 orang/bulan	100	100%	-	-
	- Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	-	-

Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	67,86%	67,86 %	100%	32,14	-
- Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	1 paket	15%	100%	-	-
- Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket	2 paket	100	100%	-	-
- Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	100	100%	-	-
- Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	3 paket	100	100%	-	-
- Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 dokumen	0	0	100%	-	-
- Jumlah paket bahan/material yang disediakan	7 paket	3 paket	100	100%	-	-
- Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 laporan	3 laporan	60	100%	60	-
Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	-	-
- Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 laporan	2 laporan	100	100%	-	-
- Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	100	100%	-	-
- Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	100	100%	-	-

Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100	100%	-	-
- Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	7 unit	7 unit	100	100%	-	-
- Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	10 unit	100	100%	-	-
Rata-rata capaian kinerja			93,57 %	100%		-

Tabel 21. Realisasi Anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)	
				Fisik	Keuangan
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	4.316.386	100	86,33
	- Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	2.598.189	100	86,61
	- Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	1.718.197	100	85,91
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.072.216.000	3.440.439.509	100	84,49
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.069.716.000	3.438.662.470	100	84,49
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.500.000	1.777.039	100	71,08
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	63.874.600	51.048.565	67,86	79,92
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1.250.000	70.707	15	5,66
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.616.750	2.680.234	100	74,11
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.582.600	20.189.089	100	93,54
	- Penyediaan Barang Cetak dan	3.786.900	3.360.135	100	88,73

	Penggandaan				
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.250.000	0	0	0
	- Penyediaan Bahan/ Material	12.668.350	11.144.553	100	87,97
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.720.000	13.603.847	60	68,99
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.295.900	156.410.364	100	62,24
	- Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	1.300.000	1.300.000	100	100
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000	18.797.264	100	37,59
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.995.900	136.313.100	100	68,16
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.883.750	29.637.830	100	92,96
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.983.750	23.132.830	100	92,59
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	6.900.000	6.505.000	100	94,28
		4.424.270.250	3.681.852.654	93,57	83,22

Strategi untuk mencapai sasaran strategis tersebut adalah melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp 4.424.270.250,- melalui kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.000.000,00
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.072.216.000,00
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 63.874.600,00
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 251.295.900,00
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 31.883.750,00
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan pagu Rp 604.661.800,00 melalui Kegiatan :
 - a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan pagu anggaran sebesar Rp

69.999.900,00; Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp 14.662.000,00 dan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi dengan pagu anggaran sebesar Rp 519.999.900,00.

Faktor - faktor yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatkan ketersediaan komoditas pangan strategis nasional antara lain : adanya kerjasama tim yang baik, kerjasama lintas OPD maupun internal OPD.

Faktor – faktor yang dirasakan menghambat antara lain :

1. Tidak adanya anggaran APBD Kabupaten untuk pengembangan sumberdaya petugas
2. Kemampuan untuk mengakses modal masih kurang.
3. Kualitas sumber daya kelompok masih berpegang pada pola sederhana belum mengarah ke bisnis.
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kantor penunjang kegiatan seperti komputer/laptop, printer, jaringan nirkabel yang dapat menjangkau semua area kantor, kendaraan dinas

Upaya yang ditempuh antara lain :

1. Tetap mengusulkan anggaran untuk peningkatan kemampuan dan ketrampilan kelompok/subak/subak abian/poktan/gapoktan/KWT
2. Untuk membantu kelompok/subak/subak abian/poktan/gapoktan/KWT tetap diadakan pendampingan/bimbingan dari petugas kabupaten
3. Untuk menjaga ketersediaan pangan, telah dicadangkan berupa beras untuk cadangan pangan pemerintah (CPP).
4. Tetap melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait secara berkesinambungan.

3.3 Realisasi Keuangan

Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan tahun 2022, didukung dengan dana APBD Kabupaten Induk sejumlah Rp.5.028.932.050,00 yang terbagi kedalam jenis belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Alokasi belanja pegawai sebesar Rp 4.069.716.000,00 (80,93%) dan alokasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 959.216.050,00 (19,07%).

Bila dibandingkan antara belanja tersebut, maka sebagian besar dana APBD digunakan sebagai belanja pegawai.

Tabel 22. Realisasi Serapan Belanja Sumber Dana APBD Kabupaten Tabanan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran	Realisasi Fisik %
			Rp	%		
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.424.270.250	3.681.852.654	83,22	742.417.596	93,57
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	4.316.386	86,33	683.614	100
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	2.598.189	86,61	401.811	100
2)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	1.718.197	85,91	281.803	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.072.216.000	3.440.439.509	84,49	631.776.491	100
3)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.069.216.000	3.438.662.470	84,49	631.053.530	100
4)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.500.000	1.777.039	71,08	722.961	100
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	63.874.600	51.048.545	79,92	12.826.055	67,86
5)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1.250.000	70.707	5,66	1.179.293	15
6)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.616.750	2.680.234	74,11	936.516	100
7)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.582.600	20.189.089	93,54	1.393.511	100
8)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.786.900	3.360.135	88,73	426.765	100
9)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.250.000	0	0	1.250.000	0
10)	Penyediaan Bahan/ Material	12.668.350	11.144.553	87,97	1.523.817	100
11)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.720.000	13.603.847	68,99	6.116.153	60
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.295.900	156.410.364	62,24	94.885.536	100
12)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.300.000	1.300.000	100	0	100
13)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000	18.797.264	37,59	31.202.736	100
14)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.995.900	136.313.100	68,16	63.682.800	100

5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.883.750	29.637.830	92,96	2.245.920	100
15)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.983.750	23.132.830	92,59	1.850.920	100
16)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.900.000	6.505.000	94,28	395.000	100
II	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	604.661.800	579.348.996	95,81	25.312.804	84,35
6	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	69.999.900	65.372.723	93,39	4.627.177	110,21
17)	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	12.500.000	11.418.941	91,35	1.081.059	100
18)	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	34.999.900	33.156.257	94,73	1.843.643	100
19)	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	10.000.000	9.512.657	95,13	487.343	100
20)	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	12.500.000	11.284.868	90,28	1.215.132	100
7	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	14.662.000	12.038.485	82,11	2.623.515	93,82
21)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	14.662.000	12.038.485	82,11	2.623.515	93,82
8	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	519.999.900	501.937.788	96,53	18.062.112	80,45
22)	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	500.000.000	484.760.194	96,95	15.239.806	100

23)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	19.999.900	17.177.594	85,89	2.822.306	100
		5.028.932.050	4.261.201.650	84,73	767.730.400	88,96

Dari tabel tersebut di atas, dapat kami sampaikan Realisasi Fisik Kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan tahun 2022 tercapai 88,96% dan Realisasi Keuangan mencapai Rp. 4.261.201.630,00 (84,73%) dari target Rp. 5.028.932.050,00. Hal ini berarti ada efisiensi dana sebesar Rp. 767.730.420,00 (15,27%) yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 631.053.530,00; belanja barang dan jasa sebesar Rp 136.676.890,00.

Selain dari dana APBD Kabupaten, kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan Tahun 2022 juga mendapat alokasi dana dari APBN melalui kegiatan :

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Pendataan Pelaku Usaha Pangan Segar
- 2) Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari

Tabel 23. Realisasi Serapan Belanja Sumber Dana APBN Pada Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 (Dana Dekonsentrasi)

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%		Sisa Anggaran
				Fisik	Keuangan	
1	Kegiatan :					
	Pelaksanaan Pendataan Pelaku Usaha Pangan Segar	25.000.000	24.492.800	100	97,97	507.200
2	Pekarangan Pangan Lestari	458.800.000	458.800.000	100	100	0
		483.800.000	483.292.800	100	99,90	507.200

Dari analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya baik itu dari dana anggaran dan sumber daya manusia pendukung dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Penggunaan dana belanja langsung dari pagu anggaran sebesar Rp 5.028.932.050,00,- yang terealisasi sebesar Rp 4.261.201.650,00 terdapat efisiensi sebesar Rp 767.730.400,00.
- 2) Sumber daya manusia yang mendukung program/kegiatan untuk mencapai target pada Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari jajaran aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan lintas OPD, anggota subak/subak abian/poktan/gapoktan, dan kelompok wanita tani (KWT)
Realisasi program/kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Ketahanan Pangan tahun 2022 rata-rata telah mencapai target yang direncanakan.

Perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan 2022 dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 24. Serapan APBD dan APBN Tahun 2021 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Pagu	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	(%)
1	APBD Kabupaten	4.947.860.601	4.414.331.833	89,22	5.028.932.050	4.261.201.650	84,73
2	APBN (Dekon)	2.303.520.000	2.300.620.000	99,87	483.800.000	483.292.800	99,90
	Jumlah	7.251.380.601	6.714.951.833	92,60	5.512.752.050	4.744.494.450	86,06

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun-tahun sebelumnya

Tabel 25. Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun-tahun sebelumnya

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Tahun 2022			Tahun 2021			Tahun 2020			Tahun 2019		
			Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pelayanan Administrasi Kantor	Prosentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD				-	-	-	373.695.500	290.012.080	77,61	419.786.800	369.625.159	88,05
	Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				-	-	-	373.695.500	290.012.080	77,61	419.786.800	369.625.159	88,05
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	4.424.270.250	3.681.852.654	83,22	3.818.850.971	3.327.773.363	87,14	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	5.000.000	4.316.386	86,33	4.401.760	3.990.250	90,65	-	-	-	-	-	-
	- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3.000.000	2.598.189	86,61	2.715.000	2.448.750	90,19	-	-	-	-	-	-
	- Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi PD	2.000.000	1.718.197	85,91	1.686.760	1.541.500	91,39	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan PD	4.072.216.000	3.440.439.509	84,49	3.540.690.380	3.096.055.700	87,44	-	-	-	-	-	-
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	4.069.716.000	3.438.662.470	84,49	3.538.998.000	3.094.584.450	87,44	-	-	-	-	-	-
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan	2.500.000	1.777.039	71,08	1.692.380	1.471.250	86,93	-	-	-	-	-	-

	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD												
	Kegiatan Administrasi Umum PD	Persentase terpenuhinya administrasi umum PD	63.874.600	51.048.545	79,92	36.978.140	33.907.800	91,70	-	-	-	-	-	-
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1.250.000	70.707	5,66	444.000	431.000	97,07	-	-	-	-	-	-
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3.616.750	2.680.234	74,11	1.602.020	1.362.800	85,07	-	-	-	-	-	-
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	21.582.600	20.189.089	93,54	23.976.200	22.893.000	95,48	-	-	-	-	-	-
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3.786.900	3.360.135	88,73	2.659.800	2.246.500	84,46	-	-	-	-	-	-
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.250.000	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
	- Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah paket bahan/ material yang disediakan	12.668.350	11.144.553	87,97	8.296.120	6.974.500	84,07	-	-	-	-	-	-
	- Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	19.720.000	13.603.847	68,99	0	0	0	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-	-	-	11.628.100	0	0	-	-	-	-	-	-

	Pemerintahan Daerah													
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	-	-	-	11.628.100	0	0	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Umum Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	251.295.900	156.410.364	62,24	202.722.041	174.231.713	85,95	-	-	-	-	-	-
	- Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat-menyurat	1.300.000	1.300.000	100	1.000.000	350.000	35,00	-	-	-	-	-	-
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	50.000.000	18.797.264	37,59	26.992.500	17.332.088	64,21	-	-	-	-	-	-
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	199.995.900	136.313.100	68,16	174.729.541	156.549.625	89,60	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	31.883.750	29.637.830	92,96	22.430.550	19.587.900	87,33	-	-	-	-	-	-
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perijinan Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	24.983.750	23.132.830	92,59	17.520.550	14.722.900	84,03	-	-	-	-	-	-

	Dinas Operasional atau Lapangan													
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	6.900.000	6.505.000	94,28	4.910.000	4.865.000	99,09	-	-	-	-	-	-
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Serapan Anggaran sesuai target	-	-	-	-	-	-	5.500.000	4.611.400	83,84	7.727.250	6.016.550	77,86
	Kegiatan Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah dokumen Sakip yang tersedia	-	-	-	-	-	-	3.000.000	2.538.500	84,62	4.105.250	3.275.550	79,79
	Kegiatan Pendataan Aset	Jumlah dokumen asset yang tersedia	-	-	-	-	-	-	2.500.000	2.072.900	82,92	3.622.000	2.741.000	75,68
3	Program Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Persentase desa yang memiliki percontohan pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan sehat	-	-	-	-	-	-	286.878.050	284.792.450	99,27	111.730.250	109.482.300	97,99
	Kegiatan Lomba Cipta Menu Pangan Lokal Berbasis Sumber Daya Lokal	Meningkatnya partisipasi wanita dalam penyediaan pangan keluarga	-	-	-	-	-	-	485.400	485.400	100	53.783.000	53.195.700	98,91
	Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Mutu Pangan	Jumlah lokasi pengambilan sampel bahan makanan segar yang diuji	-	-	-	-	-	-	15.652.750	15.036.950	96,07	24.666.250	23.402.350	94,88
	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	Jumlah kelompok yang diberdayakan	-	-	-	-	-	-	270.739.900	269.270.100	99,46	33.281.000	32.884.250	98,81
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan	604.661.800	579.348.996	95,81	587.520.170	553.118.400	94,14	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan	Persentase ketersediaan	69.999.900	65.372.723	93,39	21.601.820	20.293.450	93,44	-	-	-	-	-	-

	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	dan penyaluran pangan												
	- Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM)	12.500.000	11.418.941	91,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	34.999.900	33.156.257	94,73	12.380.300	11.616.000	93,83	-	-	-	-	-	-
	- Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	10.000.000	9.512.657	95,13	5.326.450	5.053.050	94,87	-	-	-	-	-	-
	- Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan	12.500.000	11.284.868	90,28	3.895.070	3.624.400	93,05	-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase lokasi rentan rawan pangan yang tertangani	14.662.000	12.038.485	82,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten/kota	14.662.000	12.038.485	82,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian target Konsumsi Pangan per Kapita/ Tahun	Persentase capaian target konsumsi pangan	519.999.900	501.937.788	96,53	565.918.350	532.824.950	94,15	-	-	-	-	-	-

	sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi													
	- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	500.000.000	484.760.194	96,95	560.000.000	527.328.000	94,17	-	-	-	-	-	-
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	19.999.900	17.177.594	85,89	5.918.350	5.496.950	92,88	-	-	-	-	-	-
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase desa mandiri pangan	-	-	-	1.835.950	1.562.250	85,09	-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah lokasi uji sampel pangan segar	-	-	-	1.835.950	1.562.250	85,09	-	-	-	-	-	-
5	Program Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Persentase desa mandiri pangan	-	-	-	-	-	-	18.407.000	17.343.100	94,22	76.628.850	73.386.949	95,77
	Kegiatan Pemantapan Kawasan Mandiri	Tersusunnya database pada kawasan mandiri pangan	-	-	-	-	-	-	5.762.300	5.323.550	92,39	19.476.050	18.370.049	94,32

	Pangan													
	Kegiatan Penguatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Tersedianya data ketersediaan dan rawan pangan	-	-	-	-	-	-	4.016.500	3.717.200	92,55	15.448.300	14.570.550	94,32
	Kegiatan Pertemuan Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah pertemuan koordinasi yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	1.803.200	1.803.200	100	24.565.000	23.738.600	96,64
	Monitoring dan Pengawasan Kinerja Penggilingan Padi (RMU)	Jumlah unit penggilingan padi yang terpantau	-	-	-	-	-	-	6.825.000	6.499.150	95,23	17.139.500	16.707.750	97,48
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa mandiri pangan	-	-	-	32.772.450	31.756.620	96,90	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah data ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan	-	-	-	32.772.450	31.756.620	96,90	-	-	-	-	-	-
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	Data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	-	-	-	5.996.400	5.361.150	89,41	-	-	-	-	-	-
	- Pelaksanaan, Pengadaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengisian cadangan pangan	-	-	-	26.776.050	26.395.470	98,58	-	-	-	-	-	-
6	Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	-	-	-	-	-	-	178.914.350	176.795.595	98,82	112.407.190	107.563.140	95,69

	Harga Pangan													
	Kegiatan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Data harga pangan dan pasokan pangan				-	-	-	8.750.000	8.727.900	99,75	24.409.190	22.754.080	93,22
	Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan	Pengisian gudang				-	-	-	168.125.000	166.030.845	98,75	71.423.000	69.012.980	96,63
	Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan	Jumlah jenis dokumen pengawalan Lembaga Distribusi Pangan				-	-	-	2.039.350	2.036.850	99,88	16.575.000	15.796.080	95,30
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase desa mandiri pangan	-	-	-	506.881.060	500.121.200	98,67	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan infrastruktur kawasan cadangan pangan terintegrasi	-	-	-	506.881.060	500.121.200	98,67	-	-	-	-	-	-
	- Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Tersedianya bangunan lumbung masyarakat pangan	-	-	-	155.136.860	154.857.000	99,82	-	-	-	-	-	-
	- Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Tersedianya lantai jemur	-	-	-	51.744.200	51.744.200	100	-	-	-	-	-	-
	- Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	Tersedianya mesin RMU dan rumah RMU	-	-	-	300.000.000	293.520.000	97,84	-	-	-	-	-	-
			5.028.932.050	4.261.201.650	84,73	4.947.860.601	4.414.331.833	89,22	863.394.900	773.554.625	89,59	798.835.340	736.210.548	92,16

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase realisasi keuangan pada tahun 2019 sebesar 92,16%, tahun 2020 sebesar 89,59%, tahun 2021 sebesar 89,22% dan tahun 2022 sebesar 84,73% dengan anggaran yang mengalami fluktuasi sesuai kemampuan daerah dalam mengalokasikan anggaran berdasarkan skala prioritas dan kondisi akibat pandemi covid19. Dengan terbentuknya Dinas Ketahanan Pangan tahun 2016 akhir yang sebelumnya Kantor Ketahanan Pangan diharapkan ke depannya dapat melaksanakan kegiatan pembangunan bidang ketahanan pangan ke arah lebih baik dengan penyesuaian program dan kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran yang diharapkan. Perbandingan realisasi kegiatan yang diuraikan pada laporan kinerja pertanggungjawaban mulai tahun 2018 hingga 2022 terdapat perubahan anggaran akibat rasionalisasi/refocusing anggaran.

Tabel 26. Capaian Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 sesuai dengan Rencana Jangka Menengah (Renstra) **2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	IKU	Kondisi Awal	Tahun Kinerja Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Nilai LKJIP	C	B	B	B	B	B
		Realisasi		C	BB	BB	BB	BB	B
2	Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat secara Berkelanjutan	Memantapkan ketersediaan pangan masyarakat	1. Persentase rumah tangga yang memenuhi Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	45%	45%	45%	45%	45%	45%
		Realisasi		45%	39,17%	39,28%	42,11%	46,62%	64,66%
			2. Persentase penurunan penduduk rawan pangan	10%	10%	10%	10%	10%	10%
		Realisasi		-	7%	10%	10%	10%	10%
		Meningkatkan distribusi pangan	Jumlah komoditas pokok yang tidak melampaui standar koefisien harga	3	3	3	4	5	5
		Realisasi		3	3	3	4	5	5

Sedangkan berdasarkan Renstra 2021-2026 terdapat perubahan tujuan, sasaran, program, dan indikator sampai dengan sub kegiatan sesuai dengan Permendagri No 90 tahun 2019 dan Kepmendagri No 50 tahun 2021.

Tabel 27. Capaian Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 sesuai dengan Rencana Jangka Menengah (Renstra) **2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran	IKU	Kondisi Awal 2021	Tahun Kinerja Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai LKJIP	B	72 B	73 B	74 B	75 B	75 B
		Realisasi	B	Belum					
2	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan menuju kemandirian pangan	Meningkatkan ketersediaan komoditas pangan strategis nasional	1. Rasio ketersediaan komoditas pangan strategis nasional terhadap kebutuhan masyarakat	75%	80%	85%	90%	95%	95%
		Realisasi	77,78%	77,78%					
		Memperkuat distribusi pangan strategis nasional	Ketersediaan sarana prasarana pendukung kualitas pangan utama	1 gapoktan	1 gapoktan	1 gapoktan	1 gapoktan	1 gapoktan	1 gapoktan
		Realisasi	1	0					

Tabel 28. Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Kabupaten lain, Provinsi dan Tingkat Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kabupaten Tabanan	Capaian		
				Kab/Kota Lain	Provinsi	Nasional
1	Terwujudnya ketersediaan pangan utama	Skor PPH	93,8	95	88,3	92,9

Keterangan :

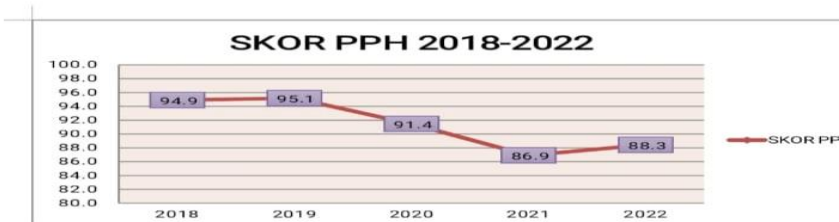
Dibandingkan dengan Kabupaten lain yaitu Kabupaten Jembrana dengan Skor PPH 95, Kabupaten Tabanan lebih kecil. Jika dibandingkan dengan tingkat provinsi, capaian Skor PPH Kabupaten Tabanan jauh lebih tinggi sehingga dapat dikatakan konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Tabanan lebih baik. Begitu pula perbandingan dengan tingkat nasional yang capaiannya 92,9, Skor PPH Kabupaten Tabanan lebih tinggi.

Skor PPH Nasional



Skor PPH Provinsi

3.3. Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan Provinsi Bali



Sumber : Susenas 2018-2019,BPS diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran. Oleh Dinas Ketahanan Pz Provinsi Bali
Susenas 2020-2022,BPS diolah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali

PPH merupakan susunan pangan yang benar-benar menjadi harapan bai tingkat konsumsi maupun ketersediaan, serta dapat digunakan sebagai pedor perencanaan dan evaluasi ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk.

Skor PPH Kabupaten/Kota lain

Adapun indikator kinerja program, kegiatan, kelompok sasaran dan Pendanaan indikator pembangunan di Kabupaten Jembrana seperti Tabel berikut :

Uraian	Sasaran	Indikator	Target	Program/kegiatan/Sub.Kegiatan	Anggaran
Meningkatnya ketersediaan Pangan Masyarakat		Nilai Tukar Petani(%)	94	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kebutuhan dan Kemandirian Pangan	
				Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan infrastruktur Logistik	179,739,000.00
		Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	95	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	957,692,600.00
				Keg. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	346,442,600.00
				Sub.Keg.Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	346,442,600.00
				Keg. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	611,250,000.00
				Sub.Keg. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	611,250,000.00
		Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan(%)	100	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	25,437,200.00
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	25,437,200.00

Tabel 29. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2022			% Capaian Sasaran Strategis	No	Program	Pagu	Realisasi	% Capaian
			Target	Realisasi	Capaian (%)						
1	Terwujudnya ketersediaan pangan utama	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	93,6	93,8	100,21	98,01	1	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	604.661.800	579.348.996	95,81
							1)	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	69.999.900	65.372.723	93,39
							2)	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	14.662.000	12.038.485	82,11
							3)	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	519.999.900	501.937.788	96,53

Dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026, sesuai dengan Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sehingga OPD baru Dinas Ketahanan Pangan mengalami penyesuaian tugas pokok dan fungsi serta program/kegiatan dalam mencapai target/sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan ketahanan pangan dengan penyesuaian aturan Peraturan Bupati No. 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Untuk tahun 2022 sesuai dengan Renstra, tujuan OPD adalah meningkatkan ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan. Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1) Meningkatkan ketersediaan komoditas pangan strategis nasional

A. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Indikator program : persentase ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan

Kegiatan : a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Indikator kinerja kegiatan yaitu persentase ketersediaan dan penyaluran pangan target 75%. Dari persentase data penyaluran pangan rata-rata tercapai 82,66%.

Kegiatan : b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

Indikator kinerja kegiatan yaitu persentase lokasi rentan rawan pangan yang tertangani dengan target 39% tercapai 36,59%

Kegiatan : c. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

Indikator kinerja kegiatan yaitu persentase capaian target konsumsi pangan dengan target 70%, tercapai 80,45% melalui akumulasi Kelompok Wanita Tani (KWT) yang sudah mendapat bantuan kegiatan yaitu sebanyak 107 KWT.

2) Memperkuat distribusi pangan strategis nasional

A. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Indikator kinerja program yang ingin dicapai adalah persentase ketersediaan infrastruktur pangan (100%)

Kegiatan : Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja kegiatan yaitu persentase penyediaan infrastruktur kawasan cadangan pangan terintegrasi. Untuk tahun 2022 tidak mendapat pendanaan APBD karena terdapat persyaratan yang tidak bisa terpenuhi oleh gapoktan berupa kepemilikan lahan minimal 10 are (SHM).

Untuk Renstra Badan Ketahanan Pangan Pusat Tahun 2015-2021 yang mengacu pada pelaksanaan kegiatan jangka menengah, untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan, yang tercermin dari menurunnya penduduk rawan pangan, stabilnya harga dan pasokan pangan pokok, dan meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat. Dari program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan sudah mendukung indikator kinerja ketahanan pangan pusat.

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan/sasaran yang direncanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan ketahanan pangan, masih perlu perbaikan-perbaikan dalam perumusan kegiatan-kegiatan untuk ke depannya. Agar tujuan/sasaran yang diinginkan dalam pembangunan ketahanan pangan tercapai sesuai target, masih diperlukan perbaikan/optimalisasi indikator-indikator pendukung seperti input berupa dana/anggaran, sumber daya manusia; output berupa keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan; outcome berupa hasil yang diperoleh dari kegiatan dan impact berupa dampak yang dirasakan oleh sasaran penerima kegiatan.

Walaupun program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan tahun 2022 umumnya memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tetapi kendala/masalah yang dihadapi tetap ada. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain :

- Review Renstra OPD masih terus dilakukan untuk perbaikan-perbaikan indikator program/kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan OPD ataupun masyarakat sebagai sasaran kegiatan
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan
- Keterbatasan sumber daya manusia
- Revisi/Perubahan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan (DPA) yang memerlukan penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan program/kegiatan a.l :

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sosialisasi, pembinaan, bimtek maupun pelatihan
- Meningkatkan kinerja OPD melalui pengajuan rumusan kegiatan setiap tahun (Rencana Kerja Anggaran)
- Penataan administrasi baik di tingkat gapoktan/poktan maupun petugas kabupaten
- Koordinasi dengan OPD terkait untuk kelengkapan data
- Mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung yang ada

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Tata kelola pemerintahan yang baik menuju *good governance*, merupakan dambaan setiap warga negara. Gerakan tata kelola pemerintahan yang baik menuju *good governance* telah dirintis sejak lahirnya Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang – Undang No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (*Outcomes oriented*). Sistem AKIP diimplementasikan secara “*self assesment*” oleh masing-masing instansi pemerintah. *Self assesment* maksudnya, instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

Dari Analisa Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Misi “**Menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian dan pariwisata**” terwujud melalui dua sasaran strategis yaitu Sasaran Meningkatkan ketersediaan komoditas pangan strategis nasional dengan capaian kinerja 77,78% dari target 80% sehingga capaiannya 97,22%; dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dengan capaian Nilai LKJIP
2. Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran dengan realisasi fisik rata-rata 88,96% dan realisasi keuangan 84,73 %.

Dari analisis aspek keuangan dapat disampaikan Realisasi Keuangan Kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan tahun 2022 mencapai 84,73% (Rp. 4.261.201.650,00) dari target Rp. 5.028.932.050,00. Sisa dana sebesar Rp 767.730.400,00 merupakan dana yang tidak diamprah dari Belanja Pegawai sebesar Rp 631.053.530,00; dan Belanja Barang dan Jasa Rp 136.676.870,00. Dari kegiatan-kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran atau tidak terealisasi umumnya pada belanja barang dan jasa akibat harga pada penjual yang lebih tinggi dari standar harga SIPD.

Terwujudnya Sasaran Dinas Ketahanan Pangan melalui kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten dan APBN agar berkesinambungan untuk membangun ketahanan pangan di Kabupaten Tabanan.

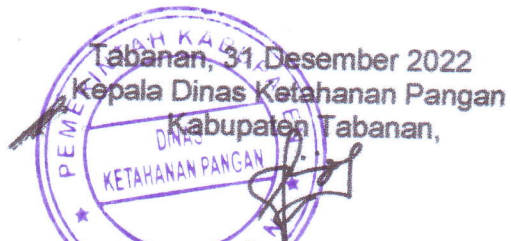
4.2 Saran-Saran

Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja tersebut di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan, maka perlu dukungan pendanaan baik dari

,

- APBD maupun APBN pada masing-masing sasaran strategis sehingga kinerja pemerintahan dapat lebih dioptimalkan.
2. Untuk mengatasi permasalahan yang sulit dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai stakeholder sehingga pembangunan ketahanan pangan dapat terintegrasi dalam pembangunan bidang lainnya dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabanan.
 3. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung lancarnya kegiatan/program.



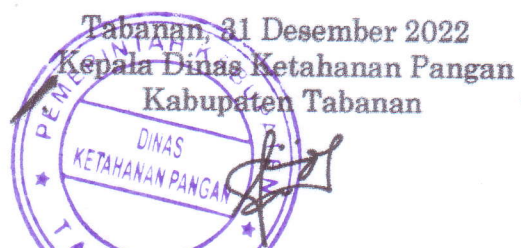
Ni Dewa Ayu Putu Sri Widyanti, SP., M.Si.
Pembina Utama Muda/(IV/c)
NIP. 19681124 200212 2 004

Pengukuran Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatkan ketersediaan komoditas pangan strategis nasional	Rasio ketersediaan komoditas pangan strategis nasional terhadap kebutuhan masyarakat melalui :	80%	77,78%	97,22
		- Informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 laporan	1 laporan	100
		- Pangan berbasis sumber daya lokal	1 laporan	1 laporan	100
		- Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	1 dokumen	1 dokumen	100
		- Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan	3 unit	3 unit	100
		- Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten/kota	3 laporan	3 laporan	100
		- Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	2 laporan	2 laporan	100
		- Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	1 laporan	1 laporan	100
2.	Memperkuat distribusi pangan	Ketersediaan sarana prasarana pendukung kualitas pangan utama melalui :	1 gapoktan	-	-
		- Tersedianya bangunan lumbung pangan masyarakat	-	-	-
		- Tersedianya lantai jemur	-	-	-
		- Tersedianya mesin RMU dan rumah RMU	-	-	-
Capaian kinerja					97,22

3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Nilai LKJip melalui :			
		- Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	100
		- Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	1 laporan	100
		- Jumlah orang uyang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 orang/bulan	25 orang/bulan	100
		- Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	2 laporan	2 laporan	100
		- Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	2 paket	2 paket	100
		- Jumlah paket peralatan rumah tangga yang tersedia	2 paket	2 paket	100
		- Jumlah paket bahan logistik kantor yang tersedia	12 paket	12 paket	100
		- Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	2 paket	3 paket	100
		- Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	2 dokumen	0	0
		- Jumlah paket bahan/ material yang tersedia	7 paket	3 paket	100
		- Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5 laporan	3 laporan	60
		- Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 laporan	2 laporan	100
		- Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	12 laporan	100
		- Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 laporan	12 laporan	100
		- Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	7 unit	7 unit	100

		- Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	10 unit	100
Rata Rata Capaian kinerja program					88,96 %
Rata Rata Capaian kinerja Kegiatan					98,35%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran					97,22%



Ni Dewa Ayu Putu Sri Widyanti, SP., M.Si
Pembina Utama Muda/(IV/c)
NIP.19681124 200212 2 004